

## Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Simalungun

Rado Damanik<sup>1</sup>, Darwin Damanik<sup>1\*</sup>, Daniel Collyn Damanik<sup>2</sup>

Universitas Simalungun<sup>1</sup>, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya<sup>2</sup>

Email: [darwin.damanik@gmail.com](mailto:darwin.damanik@gmail.com)\*

### ABSTRACT

*Poverty is one of the most complex and pressing social and economic issues in Indonesia, particularly in rural and semi-rural areas such as Simalungun Regency. The objectives of this study are, first, to determine the impact of DAU and DAK on poverty levels in Simalungun Regency during the 2006–2025 period. The methods used are descriptive and quantitative, utilizing secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Simalungun Regency for the years 2006–2025, along with an analysis technique employing Ordinary Least Squares (OLS) Multiple Linear Regression. The results of this study are (1). The General Allocation Fund (DAU) variable has a negative and significant effect on the poverty rate in Simalungun Regency; (2). The Special Allocation Fund (DAK) variable has a negative but insignificant effect on the poverty rate in Simalungun Regency; (3). Simultaneously, the General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) variables have a significant effect on the Poverty Rate in Simalungun Regency; and (4). The R-squared ( $R^2$ ) value is 0.738, so it can be concluded that the General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) variables can explain 73.80% of the Poverty Rate in Simalungun Regency, while the remaining 26.20% can be explained by factors outside the scope of this study*

*Keywords: Poverty, General Allocation Fund, Special Allocation Fund*

### ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang paling kompleks dan mendesak di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan dan perdesaan seperti Kabupaten Simalungun. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pengaruh DAU dan DAK terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Simalungun periode 2006-2025. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif dengan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simalungun dari tahun 2006 – 2025 dan teknik analisis dengan Regresi Linear Berganda Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian ini adalah

(1). Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Simalungun; (2). Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Simalungun; (3). secara simultan, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Simalungun; dan (4). Nilai R-Squared ( $R^2$ ) sebesar 0.738, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat menjelaskan variabel Tingkat kemiskinan di Kabupaten Simalungun sebesar 73,80 %, sedangkan sisanya sebesar 26,20% dapat dijelaskan oleh diluar variabel penelitian ini

Kata kunci: Kemiskinan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

## PENDAHULUAN

Dalam upaya menurunkan kemiskinan, pemerintah perlu meningkatkan kualitas ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Salah satu langkah mendasar yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur sebagai implementasi dari desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang paling kompleks dan mendesak di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan dan perdesaan seperti Kabupaten Simalungun. Sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang masih tinggi, meskipun telah mencapai kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 9,57%, dengan variasi regional yang mencolok. Di tingkat kabupaten, kemiskinan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sumber daya ekonomi.

Kabupaten Simalungun, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, merupakan contoh daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun masih bergulat dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lain di provinsi tersebut. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten Simalungun mencapai 10,5%, lebih tinggi dari rata-rata nasional, yang menunjukkan perlunya intervensi strategis untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan keuangan daerah. Sistem keuangan daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menetapkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana Perimbangan sendiri meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). PAD merupakan komponen pendapatan yang bersumber dari potensi daerah sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Sementara itu, DAU dan DAK merupakan transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. DAU diberikan secara umum untuk membiayai kebutuhan dasar daerah, sedangkan DAK

dialokasikan secara spesifik untuk program-program prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

Hubungan antara keuangan daerah dan tingkat kemiskinan telah menjadi fokus kajian ekonomi regional di Indonesia. Teori ekonomi pembangunan menekankan bahwa investasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan aksesibilitas. PAD, sebagai indikator otonomi fiskal daerah, diharapkan dapat mendorong pembangunan lokal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian oleh Akhmadi (2018) menunjukkan bahwa daerah dengan PAD yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah karena kemampuan mereka untuk mengalokasikan dana secara mandiri untuk program-program sosial.

Namun, di daerah dengan potensi ekonomi terbatas seperti Kabupaten Simalungun, ketergantungan pada transfer pusat seperti DAU dan DAK menjadi lebih dominan. DAU, yang dihitung berdasarkan formula yang mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan indeks kemahaman daerah, bertujuan untuk mengurangi disparitas fiskal antar daerah. Sementara itu, DAK dirancang untuk mengatasi masalah spesifik, seperti pembangunan jalan, irigasi, dan program kesehatan yang langsung berkontribusi pada pengurangan kemiskinan.

Studi empiris sebelumnya telah mengeksplorasi pengaruh variabel-variabel ini terhadap kemiskinan. Misalnya, penelitian oleh Firdaus dan Syarifuddin (2020) di beberapa kabupaten di Sumatera menemukan bahwa DAU memiliki dampak positif signifikan terhadap penurunan kemiskinan melalui peningkatan belanja daerah untuk sektor produktif.

Demikian pula, DAK telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan di daerah tertinggal, seperti yang ditunjukkan oleh analisis Kementerian Keuangan (2021) yang mengindikasikan bahwa alokasi DAK untuk infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar kerja dan layanan dasar. Namun, PAD sering kali menunjukkan hubungan yang lebih kompleks; di daerah dengan basis ekonomi yang kuat, PAD dapat mempercepat pengentasan kemiskinan, tetapi di daerah agraris seperti Simalungun, PAD yang rendah dapat memperburuk ketergantungan pada dana pusat. Kabupaten Simalungun, dengan sektor utama pertanian, perkebunan, dan perdagangan, memiliki PAD yang relatif kecil jika dibandingkan dengan daerah industri, sehingga transfer DAU dan DAK menjadi sumber utama pendanaan pembangunan.

Kabupaten Simalungun dipilih sebagai lokus penelitian karena karakteristik geografis dan ekonominya yang representatif bagi daerah-daerah di Sumatera Utara. Terletak di dataran tinggi dengan luas wilayah sekitar 4.372 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 850.000 jiwa, kabupaten ini memiliki potensi pertanian yang tinggi, termasuk produksi kopi, karet, dan padi. Namun, tantangan seperti aksesibilitas infrastruktur yang terbatas, tingkat pendidikan yang rendah, dan fluktuasi harga komoditas telah berkontribusi pada persistensi kemiskinan.

Data dari Pemerintah Kabupaten Simalungun menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2025, alokasi DAU dan DAK telah digunakan untuk program-program seperti pembangunan jalan desa, bantuan kesehatan, dan pengembangan pertanian, yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan. Namun, belum ada analisis mendalam tentang seberapa efektif variabel-variabel ini dalam konteks lokal, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Penelitian ini relevan dalam konteks kebijakan pembangunan nasional, terutama dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 1, yaitu mengakhiri kemiskinan

dalam segala bentuknya. Dengan menganalisis pengaruh DAU dan DAK terhadap tingkat kemiskinan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan dana tersebut. Misalnya, jika DAU terbukti lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan, maka prioritas alokasi dapat diarahkan ke sektor-sektor yang meningkatkan produktivitas.

Dalam literatur internasional, studi serupa oleh Easterly (2001) tentang aid effectiveness menunjukkan bahwa transfer dana dari pusat dapat efektif jika disertai dengan good governance di daerah. Di Indonesia, penelitian oleh Sjahrir et al. (2013) menemukan bahwa DAU dan DAK berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, tetapi efektivitasnya bergantung pada kapasitas absorpsi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengukur dampak statistik, tetapi juga mengkaji aspek kualitatif seperti implementasi program di lapangan.

Secara keseluruhan, latar belakang ini menekankan urgensi analisis terhadap hubungan antara keuangan daerah dan kemiskinan di Kabupaten Simalungun. Dengan memahami dinamika DAU dan DAK, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada formulasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga mendukung upaya nasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan di daerah-daerah serupa, memperkaya diskursus akademik tentang desentralisasi fiskal dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Kemiskinan***

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Sementara itu, Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan kemiskinan sebagai kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well-being*), yang tidak hanya mencakup pendapatan rendah, tetapi juga rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap infrastruktur.

### ***Dana Alokasi Umum (DAU)***

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), DAU merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah instrumen transfer keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. DAU dialokasikan dengan tujuan utama untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah (inter-regional fiscal disparity).

### ***Dana Alokasi Khusus (DAK)***

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung terdianya dana dalam APBN (Suparmoko, 2016:43).

## METODE

Pada penelitian ini metodenya adalah kuantitatif dengan menggunakan alat-alat statistik seperti pengujian asumsi klasik. Selanjutnya perhitungan regresi dan pengujian hipotesis dengan uji parsial atau uji T-statistik pengujian secara langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini teknis analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan program SPSS sebagai alat dalam menganalisis data. Persamaan dasar regresi liner berganda secara umum adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

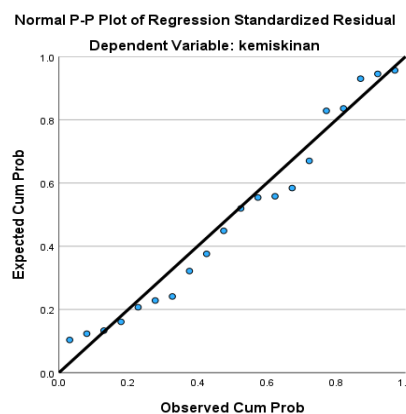
Dimana:

- y = Tingkat Kemiskinan (persen)
- a = nilai konstan (intercept)
- $\beta$  = koefisien regresi (slope)
- X1 = Dana Alokasi Umum (Rupiah)
- X2 = Dana Alokasi Khusus (Rupiah)
- e = faktor pengganggu (disturban centrem).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Uji Normalitas*

Uji normalitas adalah sebuah uji untuk menilai kesepakatan data pada sebuah kelompok data atau variabel apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, berikut disajikan P Plot hasil pengolahan data sebagai berikut:



**Gambar 1. Uji Normalitas**

### *Uji Multikolinearitas*

Guna mengetahui adanya hubungan kolinearitas antar variabel yang diteliti perlu di uji multikolinearitas, hasil sbb :

**Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients<sup>a</sup>

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.  | Collinearity Statistics |              |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|-------------------------|--------------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       | Tolerance               | VIF          |
| 1     | (Constant) | 16.698                      | 1.202      |                           | 13.898 | <.001 |                         |              |
|       | DAU        | -6.307E-9                   | .000       | -.837                     | -3.950 | .001  | .343                    | <b>2.912</b> |
|       | DAK        | -3.527E-10                  | .000       | -.027                     | -.126  | .901  | .343                    | <b>2.912</b> |

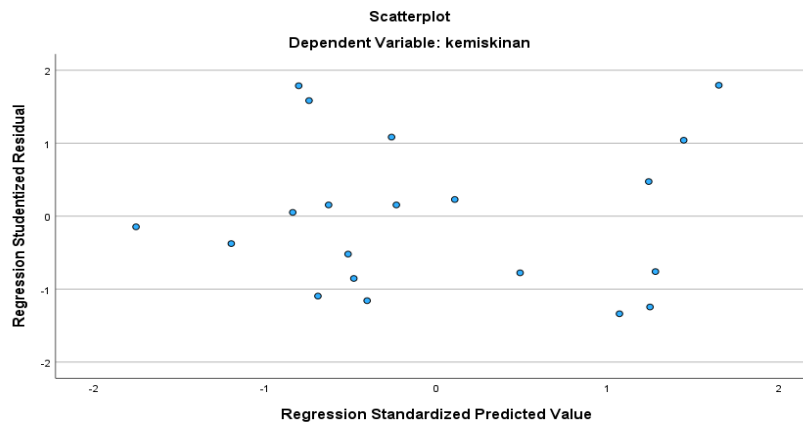
a. Dependent Variable: kemiskinan

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIF untuk Variabel DAU dan DAK < 10 maka dapat disimpulkan bahwa dari ke dua variabel dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteorkedastisitas digunakan untuk melihat apakah ketidaksamaan antara variansi ke residual dari satu kepengamatan ke pengamatan yang lain. Akibat dari tidak konstannya variansi, maka salah satu dampaknya adalah lebih besarnya variansi dari taksiran:



Gambar 2. Uji Heteroskedasitas

Dari gambar diatas terlihat bahwa sebaran titik tidak membentuk suatu pola/alur tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Heteroskedasitas atau dengan kata lain terjadi homoskedasitas. Dalam model ini terpenuhi yaitu terbebas dari Heteroskedasitas.

### Hasil Regresi

Tabel 2. Persamaan Regresi Linier

Coefficients<sup>a</sup>

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.  | Collinearity Statistics |       |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|-------------------------|-------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       | Tolerance               | VIF   |
| 1     | (Constant) | <b>16.698</b>               | 1.202      |                           | 13.898 | <.001 |                         |       |
|       | DAU        | <b>-6.307E-9</b>            | .000       | -.837                     | -3.950 | .001  | .343                    | 2.912 |
|       | DAK        | <b>-3.527E-10</b>           | .000       | -.027                     | -.126  | .901  | .343                    | 2.912 |

a. Dependent Variable: kemiskinan

Sumber : Data diolah (2026)

Dari tabel diatas maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = 16,698 - 0,00000006307 \text{ DAU} - 0,0000000003527 \text{ DAK} + e$$

Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna:

- Konstanta (16,698): Jika variabel DAU dan DAK bernilai nol, maka nilai rata-rata kemiskinan adalah sebesar 16,698.
- Koefisien DAU (-6,307E-9): Memiliki arah negatif. Artinya, setiap kenaikan DAU, maka kemiskinan cenderung menurun (dengan asumsi variabel lain tetap).
- Koefisien DAK (-3,527E-10): Juga memiliki arah negatif. Artinya, setiap kenaikan DAK, kemiskinan cenderung menurun.

### Koefisien Determinasi

**Tabel 3. Koefisien Determinasi**

Model Summary<sup>b</sup>

| Model | R                 | R Square    | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .859 <sup>a</sup> | <b>.738</b> | .707              | 1.16570                    | 2.087         |

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU

b. Dependent Variable: kemiskinan

Sumber : Data diolah (2026)

R-squared sebesar 0.738, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat menjelaskan variabel Tingkat kemiskinan di Kabupaten Simalungun sebesar 73,80 %, sedangkan sisanya sebesar 26,20% dapat dijelaskan oleh diluar variabel penelitian ini.

### Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 4. Uji Parsial (uji t)**

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |                           |               |                 |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t             | Sig.            |
|                           |            | B                           | Std. Error | Beta                      |               |                 |
| 1                         | (Constant) | <b>16.698</b>               | 1.202      |                           | <b>13.898</b> | <b>&lt;.001</b> |
|                           | DAU        | <b>-6.307E-9</b>            | .000       | -.837                     | <b>-3.950</b> | <b>.001</b>     |
|                           | DAK        | <b>-3.527E-10</b>           | .000       | -.027                     | <b>-.126</b>  | <b>.901</b>     |

a. Dependent Variable: kemiskinan

Sumber : Data diolah (2026)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki probabilitas sebesar  $0.001 < 0.05$ , hal ini dinyatakan bahwa Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat kemiskinan. Dan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki probabilitas sebesar  $0,901 > 0.05$ , hal ini dinyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak signifikan terhadap Tingkat kemiskinan.

### Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak untuk sebagai model pengujian data dan hipotesis yang diajukan dengan kriteria jika sig  $< 0.05$  maka model penelitian layak digunakan begitu juga dengan sebaliknya. Jika sig  $> 0.05$  maka model penelitian tidak layak untuk digunakan. Berikut hasil analisis penelitian uji F:

Tabel 5. Uji Simultan (Uji F)

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |        |                    |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|--------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.               |
| 1                  | Regression | 64.991         | 2  | 32.495      | 23.914 | <,001 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 23.101         | 17 | 1.359       |        |                    |
|                    | Total      | 88.091         | 19 |             |        |                    |

a. Dependent Variable: kemiskinan

b. Predictors: (Constant), DAK, DAU

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki probabilitas sebesar  $0.001 < 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel-variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kemiskinan di Kabupaten Simalungun.

Dari hasil uji diatas menunjukkan bahwa variance variabel dependen adalah Tingkat Kemiskinan dan variabel independen adalah variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam hal ini untuk melihat pengaruh terhadap variabel tersebut.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Simalungun**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Simalungun, artinya setiap peningkatan DAU akan mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Simalungun. Secara teoritis, Dana Alokasi Umum (DAU) dirancang untuk pemerataan kemampuan finansial antar-daerah guna mendanai kebutuhan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, bukti empiris menunjukkan perbedaan dampak yang kontras antara DAU dan DAK: Variabel DAU memiliki nilai Sig. 0,001, yang jauh lebih kecil dari taraf signifikansi standar 0,05. Hal ini membuktikan bahwa DAU merupakan instrumen fiskal yang sangat kuat dalam memengaruhi penurunan kemiskinan di Kabupaten Simalungun selama periode penelitian.

Beberapa studi menemukan bahwa DAU seringkali menjadi penggerak utama ekonomi daerah karena sifatnya yang fleksibel (block grant). Sari & Wijaya (2021), Dalam penelitian di wilayah Sumatera Utara, ditemukan bahwa DAU dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia dan kemiskinan. Meskipun dalam beberapa kasus DAU didominasi oleh belanja pegawai, perputaran uang dari gaji aparatur tersebut menciptakan multiplier effect pada konsumsi rumah tangga lokal yang membantu menekan angka kemiskinan.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Simalungun**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Simalungun, artinya setiap

peningkatan DAK akan mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Simalungun tetapi tidak signifikan.

Secara teoritis dan empiris, terdapat beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi karena karakteristik DAK sebagai Earmarked Grant, berbeda dengan DAU yang fleksibel, DAK adalah dana yang dialokasikan untuk kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat untuk membantu mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Hasil regresi Anda menunjukkan DAK tidak signifikan (Sig. 0,901). Hal ini sejalan dengan beberapa temuan empiris yang menyoroti kendala implementasi DAK yaitu penelitian Ramadhan & Putri (2025), meskipun mereka menemukan DAK Kesehatan efektif pasca-pandemi, mereka juga mencatat bahwa DAK seringkali bersifat sangat spesifik (earmarked) sehingga jika alokasinya tidak tepat sasaran pada sektor yang dibutuhkan masyarakat miskin di daerah tersebut, dampaknya terhadap angka kemiskinan makro menjadi tidak signifikan.

## KESIMPULAN

Analisa data penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Simalungun pada periode 2006-2025. Dan Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Simalungun pada periode 2006-2025. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.738, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat menjelaskan variabel Tingkat kemiskinan di Kabupaten Simalungun sebesar 73,80 %, sedangkan sisanya sebesar 26,20% dapat dijelaskan oleh diluar variabel penelitian ini.

## REFERENSI

- Damanik, D et al. 2024. Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar. Batam: CV. Rey Media Grafika.
- Damanik, D et al. 2024. Pengambilan Keputusan Kebijakan Teori dan Aplikasi. Medan: PT MPI.
- Dewi, Ni Wayan Ratna dan I Dewa Gede Dharma Suputra. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 18, Nomor 3.
- Fauzyny, Wulan. 2013. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2015. Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi, Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Laranga, Rosita et al. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun (2004 – 2013). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 17 N0.01 Tahun 2017.

- Nisa, Aulia Afafun. 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu EKonomi*, Volume 1 Jilid 2.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
- Pramana Indah. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Aceh.
- Purba, E et al. 2020. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Putri, Zuwesty Eka. 2015. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 5, Nomor 2.
- Rahajeng, Anggi. 2016. *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rinanda, Teja dan Subambang. 2020. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi Hukum & Humaniora* Volume 1 Nomor 1 Maret 2020, Universitas Graha Kirana.
- Rori, Chindy Febri, Antonius Y Luntungan, Audie O Niode. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 Nomor 02.
- Siddik, S., dkk. (2019). Dana Alokasi Khusus dan Dampaknya terhadap Pembangunan Infrastruktur Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*
- Sinaga, Jefri Alfin, Elidawaty Purba, dan Pawan Darasa Panjaitan. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 2, No 1.
- Suliyanto. 2018. *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi.
- Suparmoko, M. 2016. *Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwandika, Putu Eka dan I Nyoman Mahaendra Yasa. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud* Volume 4 Nomor 7.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.